

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji subordinasi kapasitas kepemimpinan perempuan yang dialami oleh kandidat perempuan, Dyah Hayuning Pratiwi atau yang dikenal dengan Tiwi, dalam pemilihan kepala daerah langsung di Purbalingga tahun 2024. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa kampanye pilkada menginternalisasikan norma patriarki yang dibungkus dalam *jingle* politik yang modern. Berdasarkan pengalaman yang di klaim oleh Tiwi, penelitian ini mengungkap bahwa subordinasi kepemimpinan perempuan telah terjadi sejak kemunculannya dalam politik. Artinya habitus masyarakat patriarki yang menganggap kepemimpinan sebagai kodrat laki-laki tidak berubah secara kontekstual, tetapi terus direproduksi dan beradaptasi dengan perkembangan jaman. Penggunaan habitus masyarakat patriarki berhasil melompati aturan-aturan kampanye sehingga subordinasi tidak dianggap sebagai pelanggaran, tetapi doxa atau kepercayaan masyarakat. Narasi seperti “Pemimpin sing LanangLanang bae (Pemimpin yang laki-laki saja)” dalam sebuah *jingle* politik dianggap sebagai hal yang normal dan kodrati, bukan larangan secara eksplisit bahwa perempuan tidak boleh maju keranah kepemimpinan politik. Hal ini membuktikan bahwa dominasi maskulin tidak bisa dipahami sebagai suatu yang dilakukan secara ‘kasar’, tetapi justru dominasi ini bersifat ‘subtle’. Hal ini menyebabkan sulitnya menyadari dominasi yang ada karena mereka seolah-olah melekat dan alamiah. Narasi tersebut diterima dengan mudah karena mereka merasa hal tersebut menyatu

dengan mereka sebagai habitus masyarakat patriarki dan terus direproduksi dalam wujud yang baru.

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana subordinasi menjadi akar kerentanan kepemimpinan perempuan, yang terjadi sejak kehadirannya dalam politik. Hibriditas feminisme yang menjadi ciri khas politisi perempuan yang maju keranah politik secara tidak sadar justru menegaskan subordinasi itu sendiri. Tiwi menyadari bahwa kepemimpinannya dipengaruhi oleh keluarganya yang hingga kini menguasai politik lokal purbalingga, terutama ayahnya yang merupakan mantan Bupati Purbalingga Tahun 2010-2015. Arogansi kerabat Tiwi dan isu lokal masyarakat terkait bisnis tidak berbadan hukum yang dimiliki suami Tiwi, menjadi alasan masyarakat enggan memilihnya kembali pada Pilkada tahun 2024. Penelitian ini menungkap bahwa peran yang dimainkan oleh para elite kekuasaan dan tipisnya kekuasaan yang mereka miliki menyebabkan stigma kepemimpinan mereka menjadi rentan. Sulitnya pengakuan terhadap pencapaian perempuan membuat kepemimpinan mereka dianggap gagal. Kegagalan pembangunan infrastruktur menjadi masalah utama yang berhasil menyematkan anggapan bahwa Tiwi tidak layak menjadi pemimpin. Standarisasi kepemimpinan maskulin dalam masyarakat membuat perempuan sulit untuk berada pada posisi mereka sebagai wakil dari kepentingan kaum yang tertindas. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana kekurangan perempuan dalam sebuah kepemimpinan secara sengaja digunakan untuk menimbulkan stigma bahwa pemimpin seharusnya merupakan laki-laki.

Potret ini menarik, mengingat hibriditas feminisme yang menjadi ciri khas perempuan Indonesia yang maju ke ranah politik justru tidak selalu menghantarkan

perempuan kepada kemenangan. Selain itu, ekspektasi masyarakat yang menganggap laki-laki sebagai standar universal, menempatkan perempuan pada derajat yang lain. Tidak mengherankan jika kehadiran perempuan dalam politik masih mengalami hambatan akibat adanya stereotip gender yang dipertahankan dan diinternalisasikan dalam kontetasi politik. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini berfungsi sebagai kritik terhadap struktur sosial dalam masyarakat patriarki yang membatasi peran perempuan melalui berbagai cara yang dianggap sah sebagai aturan normatif maupun hukum formal.

